

PENGEMBANGAN SYSTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIK UNTUK
MENCiptAKAN SEORANG PENDIDIK YANG PROFESSIONAL

Oleh

M. Nugroho Adi Saputro¹⁾, Bachtiar Hadi²⁾

^{1,2}Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Manajemen Pendidikan Islam Univesitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ¹Saputro1610@gmail.com, ²bachtiarhadi@gmail.com

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk 1)menilisk pengembangan system penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidik 2) peran penjaminan mutu pendidikan dalam lembaga pendidikan dan 3) memahami esensi system penjaminan mutu pendidikan serta output yang ditawarkan oleh penjaminan mutu. Adapun metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi litelatur. Hasil dari penelitian ini adalah 1) pengembangan penjaminan mutu dalam suatu organisasi bisa dikatakan sebagai ruh dalam sebuah organisasi, termasuk pendidikan. khususnya seorang pendidik yang memiliki peranan penting sebagai penggerak utama. Pengembangan dari system penjaminan mutu terkhusus pendidik dapat diarahkan kepada pembangunan konsep pendidik professional yang lebih luas 2) sistem penjaminan mutu dapat dikatakan sebagai suatu instrumen metodologis yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. 3) esensi dari penjaminan mutu ialah mutu itu sendiri, sedangkan yang menjadi tolak ukur adalah pelanggan sebagai focus utama dari penjaminan mutu, sedangkan output yang ditawarkan ialah produk atau pun jasa yang tentunya sesuai dengan pemangku kepentingan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga kemudian dengan konsep pendidik professional yang tawarkan lebih mengarah pada pandangan yang lebih luas dengan menuntut keprofesionalan secara totalitas bukan hanya sekedar syarat. Meskipun terlihat samar sama, namun sejatinya konsep keprofesionalan ini memaparkan tingkat kejelasan yang lebih berarti yakni dengan memiliki jiwa pendidik sebagai landasan utamanya.

Keywords: Pengembangan Penjaminan Mutu, Pendidik.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia di tingkat ASEAN masih terbelang belum mencapai apa yang di harapkan, bahkan dengan Negara tetangga yakni Malaysia dan Brunai Darussalam. Berdasarkan data yang dilansir Programme for International Student Assesment (PISA) di tahun 2018, pendidikan Indonesia berada di posisi ke-lima ASEAN.¹ Sebab demikian, dengan mutu pendidikan yang baik sebagaimana pendapat umum dikatakan

bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas mutu pendidikannya. Lebih spesifik, dewasa ini, bangsa-bangsa yang mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ialah bangsa yang melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada aspek kemanusiaan yakni dengan pendidikan². Mutu pendidikan selalu menjadi salah satu isu yang dianggap urgen dalam kehidupan bangsa. Mutu pendidikan haruslah bersifat kualitas juga kuantitas. Artinya, pendidikan kualitas ialah

1

<https://malangtimes.com/baca/46876/20191206/090800/kualitas-pendidikan-indonesia-peringkat-5-asean-warganet-20-tahun-reformasi-masih-kalah-dengan-malaysia-miris-jiwa> di akses 23-10-2020

² Kusnandi, "Konsep Dasar dan Stategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan", Dalam Jurnal IJEMAR Vol. 1 No. 1 2017, h. 107

sekolah haruslah meningkatkan dengan berbagai aspeknya dari waktu ke waktu sehingga akan terlihat perkembangan serta kemajuan suatu sekolah, dan pendidikan kuantitas ialah sekolah haruslah menyebar kesegala penjuru negeri agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia.

Demikian dengan Indonesia, mutu pendidikan dianggap menjadi tolak ukur dalam menilai tercapainya tujuan pendidikan Nasional. Namun apa daya, nyatanya potret pendidikan Indonesia saat ini masih terbilang memiliki mutu yang rendah, meski pemerintah dalam kiat kali waktu selalu berusaha melakukan yang terbaik demi memajukan mutu pendidikan Indonesia. Pada dasarnya persoalan mutu pendidikan sangatlah kompleks dan rumit, persoalan tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Dimana mutu tidak hanya mengenai output melainkan juga input. Salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah pentingnya mutu dari pelaku pendidikan, dalam konteks ini yakni sumber daya manusia itu sendiri terkhusus ialah pendidik. Tak jarang seorang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan tidak profesional dalam menjalani bidangnya. Sebagai imbasnya ialah sekolah tidak dapat melahirkan peserta didik yang utuh sebagai dirinya dan terkadang berimbas pada mutu lulusan. Tak jarang pula anak didik ketika lulus masih kebingungan akan siapakah dirinya? Artinya pendidikan dewasa ini mengalami degradasi makna akan pendidikan itu sendiri.

Berdasar amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang secara terpadu terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Dan

menimbang salah satu nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia juga bangsa. Disisi lain, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah, Undang-Undang tersebut memberi dampak positif pada pengelolaan pendidikan di daerah. Salah satunya ialah sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat berfokus pada kebutuhan serta persoalan yang dihadapi di daerah tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti tak memiliki dampak negatif.

Melalui Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), pemerintah melakukan suatu upaya untuk menyikapi dampak negatif terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dengan melakukan sebuah standarisasi mutu baik yang bersifat regional maupun nasional sebagai bentuk perhatian dalam upaya peningkatan dan penjaminan mutu suatu pendidikan³. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan dalam konteks Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang juga berdampak pada pendidikan, bergantung pada tiga faktor utama yakni guru, kepala sekolah dan pengawas, sebab ketiga komponen inilah yang menjadi penentu serta penggerak utama demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas (Mulyasa, 2012)⁴. Hal tersebut mengingatkan bahwa mutu pendidikan berkaitan erat dengan martabat bangsa dan mutu pendidikan merupakan aspek penting untuk terus dikaji terutama berkenaan dengan input (terkhusus guru) sebagai peran pelayanan dan output (peserta didik) dapat menjadi

³ Haryono dan Budiyo, dkk, “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang,” *Jurnal PANJAR* 1, no. 1 (2019): h. 18.

⁴ Kusnandi, “Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan,” *Jurnal IJEMAR* 1, no. 1 (Desember 2017): h.108.

manusia seutuhnya dan pelaku pengguna pendidikan yang lain.

Darmaji dkk⁵ dalam artikelnya mengatakan implementasi penjaminan mutu internal sekolah memberikan dampak positif pada sekolah. Salah satunya sekolah mampu memperoleh beberapa predikat prestasi baik dalam kancah nasional maupun internasional. Hal demikian dilakukan dengan pola pengelolaan sekolah yang unggul dalam proses (*best process*) sekolah berhasil mendapatkan *output* dan *outcome* yang diinginkan. Kemudian Nyoman Sridana⁶ memberi penekanan bahwa pengetahuan penjaminan mutu haruslah dipahami oleh pelaku pendidikan, khususnya kepala sekolah sebagai seorang supervisor dan diikuti oleh komponen pelaku pendidikan yang lain. Kembali ditekankan oleh Abdul Hadi⁷ bahwa dengan menerapkan system penjaminan mutu khususnya *Total Quality Management (TQM)*. TQM dalam satuan pendidikan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan, lembaga pendidikan akan lebih terfokus pada memberikan layanan pendidikan yang tinggi, memusatkan perhatian pada pelanggan, dan sebagai sarana pemecahan masalah. Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut penulis tergerak untuk melakukan sebuah pengembangan penjaminan mutu khususnya terhadap pendidik sehingga dapat memunculkan suatu konsep ataupun inovasi baru terhadap penjaminan mutu khususnya pendidik yang berkualitas.

LANDASAN TEORI

Sistem penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Terutama

negara lewat pemerintah baik di kancah regional maupun nasional. Penjaminan mutu pada dasarnya berkaitan erat dengan fungsi manajemen, sebab dengan optimalnya suatu fungsi manajemen akan sangat berpengaruh pada pengembangan serta penjaminan mutu dalam suatu bidang jasa seperti pendidikan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya untuk mengendalikan mutu agar semua aspek yang terkait terkelola dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep yang terkait dengan manajemen mutu yakni *Quality Assurance*.

Manajemen mutu bukan lagi konsep baru dalam pendidikan, manajemen mutu yang mulanya digunakan dalam dunia industry kini diadopsi dalam dunia pendidikan, khususnya Indonesia. Dengan adanya manajemen mutu ini kemudian dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia pendidikan.

1. Teori dan Hakikat Penjaminan Mutu Pendidikan

Definisi mutu pada dasarnya memiliki definisi yang bervariasi. Dalam pendidikan sendiri, mutu merupakan sebuah jaminan kepuasan layanan pendidikan. Baik di sekolah, proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Yang jelas secara keseluruhan dalam proses pendidikan. Sallis, 2007; Kambey, 2004 mengatakan kepuasan layanan pendidikan diukur dari kepentingan pelanggan pendidikan yang terdiri dari pelanggan *internal* dan *eksternal*.⁸ Pelanggan *internal* meliputi para pendidik dan staf pendukung, atau dengan kata lain komponen pengelola pendidikan. Sedang pelanggan *eksternal* meliputi orang tua, serta

⁵ Darmaji, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan, "Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan," *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 3 (28 Juli 2019): 130–36, <https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>.

⁶ Nyoman Sridana, Sudirman Wilian, dan Dadi Setiadi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)," *Jurnal Pengabdian*

Magister Pendidikan IPA 1, no. 1 (22 Desember 2018), <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i1.212>.

⁷ Abdul Hadi, "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.5260>.

⁸ Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: ZAHIR publishing, 2017), h. 11.

pelanggan tersier yakni pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat (*stakeholder*).

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus menggunakan berbagai cara untuk menterjemahkan kedalam produk atau suatu layanan baru yang inovatif. Mengingat bahwa mutu memiliki peranan penting terhadap suatu produk ataupun jasa serta para pelanggan. Sebagaimana dijelaskan Goets dan Davis (dalam Tjiptono, 2001) bahwa mutu atau kualitas merupakan suatu yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan⁹.

Kusnandi¹⁰ (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa proses pendidikan merupakan seperangkat upaya input menjadi output yang diharapkan. Yang artinya pendidikan menjadi suatu proses yang berjalan secara terus menerus yang meliputi pengelolaan kelembagaan, pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, belajar-mengajar, proses monitoring dan evaluasi. Untuk itulah dalam pelaksanaan kesemuanya berkenaan dengan pelayanan. Penjaminan mutu dimulai pada saat input dan output, dimana output akan dinilai secara langsung oleh stakeholder. Lebih lanjut kusnandi menjelaskan output tidak hanya berupa lulusan, melainkan juga mengenai kinerja, prestasi sekolah, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi serta kehidupan kerja SDM yang ada. Hal ini sekali menunjukkan bahwa hakikat penjaminan mutu menjadi suatu keharusan dalam proses pendidikan.

2. Teori pengembangan lembaga pendidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Jika

dikaitkan dalam suatu lembaga atau organisasi maka artinya ialah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu titik lebih baik. Mengingat lembaga atau organisasi khususnya pendidikan saat ini menghadapi persaingan yang semakin kompleks, baik yang bersifat actual maupun potensial. Actual berarti persoalan-persoalan yang bersifat nyata, sedang potensial berkenaan dengan persoalan-persoalan SDM yang sifatnya lebih kompleks dan mengarah pada proses visi misi kedepan. Dengan demikian, lembaga pendidikan khususnya dalam menghadapi persoalan tanpa mengabaikan hal-hal yang actual, hal yang paling dasar adalah hal-hal yang berkenaan dengan sumber daya manusia sebagai prioritas.

Para pakar mengatakan, peran SDM dipandang lebih penting dalam proses kemajuan lembaga atau organisasi¹¹. Sanusi dalam pengantar buku konsep pengembangan organisasi pendidikan mengatakan pengembangan SDM merupakan prasyarat bagi pengembangan organisasi¹². Artinya, tanpa adanya SDM yang memadai organisasi tidak akan mampu bertahan di dalam era kompetisi ini dan demikian sebaliknya.

Kaitannya dengan pengembangan organisasi lembaga pendidikan Iskandar (1982) pengembangan lembaga pendidikan ialah upaya lembaga baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka membawa nama lembaga kearah yang lebih baik dan bermutu¹³ Senada dengan hal di atas H.M. Arifin (1998) mengatakan bahwa pengembangan pendidikan ialah proses perubahan secara bertahap ke arah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan lebih luas serta mendalam, yang secara menyeluruh dapat

⁹ Roskina Mas, h. 15.

¹⁰ "Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan."

¹¹ Rusdiana, *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*, 1 (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016), h. 5.

¹² h 6.

¹³ Iskandar Wiryokusumo, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 93.

tercipta kesempurnaan atau kematangan pada peserta didik¹⁴.

Dari definisi di atas, dapat pula diartikan pengembangan organisasi merupakan suatu proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi di dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang bersifat dinamis, oleh sebab itu untuk mencapai hal tersebut perlu adanya SDM yang memadai agar kinerja dalam organisasi dapat berjalan secara optimal dan organisasi dapat mempertahankan eksistensinya.

3. Peran penting pendidik dan tenaga kependidikan

Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting khususnya dalam pendidikan dan kehidupan suatu bangsa. Pendidik sebagai unsur yang dominan dalam proses pendidikan, sehingga tidak lain kualitas pendidikan sedikit banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagai lapis kedua. Oleh sebab itu profesi pendidik menjadi syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, dengan meningkatkan kualitas pendidik akan mendorong pada kualitas pendidikan sebagai proses dan hasilnya¹⁵.

Sebagaimana kita tahu bahwa tugas pendidik tidak lain adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta mampu mengembangkan kepribadian yang ada di dalam dirinya. Atas dasar tugas yang diemban oleh pendidik yang cukup berat, pendidik sudah semestinya berupaya untuk selalu mengembangkan diri sendiri agar dapat menjalankan perannya secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata demi

kepentingan pembangunan bangsa dan tujuan pendidikan nasional.

Nana Syaodih dalam Mulyasa (2003) mengatakan, betapapun bagusnya suatu kurikulum, tetapi hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik di kelas¹⁶. Kemudian ditegaskan oleh Sardiman (2001) peranan guru di sini sebagai motivator sangat penting, hal ini menyangkut esensi pekerjaan guru sebagai pendidik yang membutuhkan kemahiran social, menyangkut performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri¹⁷.

Senada dengan hal di atas, Erni Munastiwi¹⁸ mengatakan bahwa pendidik atau guru merupakan salah satu orang terdekat dengan anak didik setelah orang tua, oleh karena itu pendidik atau guru memiliki posisi strategis dalam mengupayakan perkembangan kreativitas anak didik. selain itu pendidik atau guru ialah seorang motivator bagi peserta didiknya. Tidak jarang dengan keprofesionalan seorang pendidik banyak dari peserta didik yang termotivasi. Lantas kemudian di simpulkan bahwa seorang guru haruslah berperan sebagai pendidik sejati, motivator, teladan, pengajar, pembimbing, pelatih, pengevaluasi.

Berdasarkan hal di atas setidaknya menggambarkan bahwa sejatinya peran seorang pendidik dalam mensukseskan pendidikan juga pembangunan nasional ialah sangat berpengaruh. Khususnya sumber daya manusia Indonesia

METODE PENELITIAN

1. Jenis pendekatan Penelitian

Pendidikan 2, no. 1 (2 Maret 2012): h. 70, <https://doi.org/10.21831/jep.v2i1.656>.

¹⁷ Suwarno, h. 72.

¹⁸ Sartika M Taher dan Erni Munastiwi, "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Di TK Islam Terpadu Salsabila Al-Muthi'in Yogyakarta," . . *Juni 4*, no. 2 (2019): h. 39.

¹⁴ H.M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Pengarahan Agama* (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1998), h. 208.

¹⁵ - Mustofa, "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 4*, no. 1 (29 Februari 2012): h. 80, <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>.

¹⁶ - Suwarno, "Peran Guru dalam Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2004," *Jurnal Ekonomi dan*

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji data dan menggambarkan realita yang konkrit dan kompleks. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini mengkaji atau mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata, atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh simpulan.¹⁹

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara melihat-lihat dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa berwujud rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data, surat-surat, rekaman gambar, maupun benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa.²⁰

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti : Buku, Artikel, Jurnal yang di dalamnya mengkaji persoalan yang diteliti yaitu peran penting seorang pendidik (guru) sebagai salah satu penopang penjaminan mutu dan esensi konsep penjaminan mutu dalam pendidikan serta output yang ditawarkan.

3. Analisis Data

Analisis data dari pengumpulan hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data dengan cara non statistic untuk data deskriptif atau tekstual.²¹ Artinya

data deskriptif hanya dianalisis isinya dan karena itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, sebagai metode tafsir teks. Sebagaimana diungkapkan Fraenkel dan Wallen bahwa *content analysis* atau analisa isi adalah teknik yang dapat digunakan penulis untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti teks, buku, artikel, jurnal, koran amajalah dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.²²

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami orang lain. Proses analisis daya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi “kasar” yang muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuang data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas. Jadi, setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya dan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 6

²⁰ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi dalam Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 164

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal 85.

²² Rachmat Kriyantono, *Teknik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 232-233

kecocokannya yakni merupakan vasiliditasnya.²³

Analisis data ini adalah cara untuk mengolah data yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan sehingga dari situ kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Data yang dianalisis dilakukan dengan menggunakan pencarian fakta yang diinterpretasikan dengan tepat, kemudian data tersebut dipaparkan dari teori umum menuju kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dilansir Kompasiana (18 juni 2015), dikatakan ada beberapa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Dijelaskan bahwa pendidik yang seharusnya mempunyai motivasi untuk mengembangkan dan memperbaharui keilmuannya dengan melakukan berbagai hal seperti membaca dan mempelajari metode dan media pembelajaran, tidak dilakukan oleh pendidik yang terbilang senior. Sehingga tidak heran bila pendidik senior terbilang cenderung stagnan tidak berkembang. Secara implisif hal tersebut berdampak pada kemajuan pendidikan²⁴.

Selain itu Media Mahasiswa Indonesia (4 april 2020)²⁵ menegaskan selain hal di atas, lemahnya pendidik dalam menggali potensi peserta didik menjadi salah satu point yang cukup actual. Tak jarang pendidik hanya sekedar melakukan *transfer of knowledge* tidak melakukan *transfer of value*. Sehingga hal ini berdampak pada mutu lulusan yang tidak kompeten dan hanya sekedar lulus, peserta didik tidak menemukan siapa jati dirinya. Hal ini disebabkan oleh tidak kreatifnya seorang

pendidik dalam mengajar dan kurangnya jiwa pendidik dalam diri pendidik.

Kembali ditegaskan oleh Nana Surya Permana²⁶ bahwa salah satu sebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidik (kompetensi, wawasan) sehingga berdampak tidak mampunya menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Dengan rendahnya kualitas pembelajaran di dalam maupun diluar kelas hal tersebut secara implisif akan berdampak pada peserta didik. Dimana peserta didik tidak mampu mengait materi yang diajarkan dan cenderung bersikap acuh tak acuh.

Senada dengan hal di atas dikutip Mustofa atas Dahrin, 2000 bahwa professional guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam bidang keilmuan. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat mengajar bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mutu dan profesionalisme guru jauh dari harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan penyampaian materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar berkualitas.

Dari beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidik di Indonesia masih memiliki nilai yang jauh dari harapan. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidik memiliki peran yang cukup esensial dan memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam kemajuan bangsa khususnya sumber daya manusia. Oleh sebab demikian penting kiranya untuk kembali menggali mengenai professionalism pendidik sebagai salah satu upaya pengembangan konsep professionalism pendidik.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 44

²⁴ <https://www.kompasiana.com/yunitamn/54f99080a3331140548b496d/penyebab-rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia> di akses 19-januari 2021

²⁵ <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/> di akses 19 januari 2021

²⁶ Nana Surya Permana, "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru," *Studia Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 8.

Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan di atas, terkait dengan mutu pendidikan pemerintah telah melakukan sebuah standarisasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, hal demikian terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi ruang lingkup SNP dalam pasal 2 ayat (1) yakni a) standar isi; b) standar proses; c) standar kompetensi lulusan; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; e) standar sarana dan prasarana; f) standar pengelolaan; g) standar pembiayaan; h) standar penilaian pendidikan²⁷. Untuk itulah mengapa penjaminan mutu pendidikan menjadi sesuatu yang sangat esensial untuk terus dikembangkan.

Dalam penulisan artikel ini, penulis membatasi terkait persoalan mengenai penjaminan mutu pendidikan, sebab sebagaimana telah diungkap, persoalan mutu pendidikan merupakan persoalan yang pelik nan sulit. Penulis dalam penulisan artikel ini berupaya untuk melakukan pengembangan penjaminan mutu khususnya pendidik dari sudut pandang pemahaman dan arti yang lebih luas, selain itu penulis juga menjelaskan peran penting sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan, esensi serta output yang ditawarkan sistem penjaminan mutu. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidik

Sebagaimana kita ketahui, ada berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan, antara lain ialah : guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Dari sekian factor tersebut, factor utama yang memberikan kontribusi secara penuh terhadap pendidikan ialah pendidik (guru). Pengertian guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 (guru dan dosen) ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah²⁸. Selain factor utama, UU guru dan dosen digunakan sebagai landasan hukum dalam pengembangan mutu pendidik.

Dalam islam sendiri dijelaskan pendidik ialah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensinya, baik spiritual, afektif, kognitif, psikomotorik ke arah yang lebih baik secara optimal dan seimbang yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam²⁹.

Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa diantara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru³⁰. Berdasarkan temuan tersebut tidak diragukan lagi bahwa guru memiliki peranan penting dalam proses pendidikan khususnya pembelajaran dan tentunya memiliki keterkaitan dengan mutu pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, Negara Singapore

²⁷ "Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan," t.t.

²⁸ "Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen," t.t.

²⁹ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter* (Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 206.

³⁰ Eko Putro Widoyoko, "Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," dalam *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru* (Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2008), 9.

yang menduduki peringkat pertama pendidikan terbaik ditingkat ASEAN dan menjadi salah satu Negara yang memiliki kualitas pendidikan baik ditingkat internasional, salah satu yang menjadi sorotan adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, Singapore telah mengembangkan suatu kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu. Yakni dengan kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan serta kesejahteraan hidup para guru.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas seorang pendidik, salah satunya pada tahun 2005 Indonesia telah memiliki Undang-undang Guru dan Dosen. Secara umum maksud dan tujuan adanya UU Guru dan Dosen tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mutu pendidikan Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya sebuah standarisasi seorang pendidik tentunya apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional akan tercapai, yakni lahirnya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa, professional, berkarakter dan yang lebih penting adalah menjadi dirinya sendiri.³¹

Berbicara persoalan pendidik yang dianggap memiliki peran sangat penting dalam pengembangan pendidikan dan mutu pendidikan, penulis beranggapan bahwa setidaknya hal utama yang menjadi dasar adalah konsep pendidik professional. Konsep pendidik professional merupakan suatu komitmen dasar yang harus ada dalam diri seorang guru. Dengan komitmen sebagai kunci utama seiring berjalannya waktu apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional lambat laun akan tercapai dan tidak terlepas dari hakikat pendidikan itu sendiri yakni pendidikan yang memanusiakan manusia atau dalam islam disebut sebagai insan ulum albab.

³¹ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, 1 ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), h. 23.

✓ Konsep pendidik professional sebagai pengembangan penjaminan mutu pendidik

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 (guru dan dosen) pasal 10 ayat (1) ada beberapa kompetensi yang harus ada dalam diri seorang guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut merupakan suatu pondasi dasar yang harus ada dalam diri seorang guru. Kompetensi pedagogik ialah kemampuan dimana seorang guru haruslah mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan tepat sasaran. Kompetensi kepribadian ialah kemampuan yang secara khusus melekat secara individual, seperti seorang guru haruslah memiliki budi pekerti yang baik, berakhlak mulia, berkepribadian mantap, arif dan berwibawa serta mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Kompetensi sosial ialah suatu kemampuan untuk berinteraksi, baik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, sesama guru, orang tua wali dan masyarakat sekitar secara umum³². Dan kompetensi professional secara umum diartikan seorang guru haruslah menguasai bahan ajar secara luas dan mendalam terkait materi bahan ajarnya.

Berdasarkan paparan di atas, poin penting menurut penulis yang dianggap mengakomodasi peran penting seorang pendidik dalam penjaminan mutu ialah konsep keprofesionalan seorang guru. Dengan dalih bahwa professional secara makna memiliki arti ahli dalam penguasaan bidang tertentu sehingga dalam praktiknya dapat menunjang suatu keberhasilan.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya seorang pendidik yang professional tentu memiliki suatu kompetensi. Istilah kompetensi setidaknya memiliki berbagai makna, Broke

³² Fitri Mulyani, "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 03, no. 01 (2009): h. 2.

dan Stone (1995) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai (*descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*) yang artinya kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti (Mulyasa, 2008 :25). Pengertian lain yang senada disampaikan oleh Sarima (2009:17) kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya³³. Ditegaskan oleh (Kessler 2011) bahwa kompetensi merupakan karakteristik utama yang dimiliki individu dalam setiap bidang profesi yang dapat membantunya ke arah keberhasilan³⁴. Kemudian istilah kompetensi kembali dijabarkan oleh (Palan, 2007) setidaknya ada dua istilah atau aliran yang berbeda tentang konsep kompetensi yang dilihat dari kesesuaian dalam pekerjaan yakni *competency* (kompetensi) yang berarti deskripsi mengenai perilaku dan *competence* (kecakapan) yang berarti deskripsi tugas atau hasil suatu pekerjaan tertentu³⁵. Kemudian pepatah Jawa mengatakan, “*Guru iku teges e digugu lan ditiru*”, jika dijabarkan setidaknya memiliki arti seorang guru ialah seorang teladan yang baik dan patut dicontoh untuk anak didiknya. Hal demikiannya yang kemudian menjadi dalih kuat bahwa kosep pendidik professional memiliki tempat yang special dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan (Imron, 1995). Lebih-lebih guru yang unggul (*the excellent teacher*) merupakan *critical resource in any excellent teaching learning*

activities. A school system is only as good as the people make it. Oleh karena itu, dalam membangun pembelajaran yang berkualitas di sekolah, guru professional mutlak diperlukan³⁶. Bafadal (2004) mengemukakan guru yang professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Mengingat perkembangan dan tuntutan zaman serta sebagai bentuk upaya peningkatan pendidikan mempersyaratkan bahwa guru haruslah seorang yang professional yakni seseorang yang memiliki pengetahuan luas, kematangan keimanan, serta mampu menggerakkan dirinya sendiri dalam rangka memajukan pendidikan. Dengan kata lain seorang guru haruslah memiliki jiwa pendidik dan kesadaran akan perannya untuk memajukan bangsa.

Senada dengan hal di atas, Erni Munastiwi beranggapan bahwa pendidik professional ialah seseorang yang memiliki setidaknya pengalaman mengajar, lebih dari itu seorang pendidik professional haruslah memiliki kemampuan intelektual, moralitas, imanm jiwa pengabdian, disiplin, tanggung jawab, berpandangan luas tentang dunia pendidikan, kemampuan manajerial, berkualitas, kreatif, berpikiran terbuka, professional dibidang potensi, membawa pengaruh terhadap perkembangan siswa³⁷.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik sebuah konsep bahwa seorang guru yang professional ialah seorang yang memiliki kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas serta mampu merancang dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan pendidikan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu seorang guru yang professional haruslah menguasai pelbagai disiplin ilmu,

³³ Mulyani, h. 2.

³⁴ Koswara Koswara dan Rasto Rasto, “KOMPETENSI DAN KINERJA GURU BERDASARKAN SERTIFIKASI PROFESI,” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 1, no. 1 (18 Agustus 2016): h. 63

³⁵ Koswara dan Rasto, h. 63.

³⁶ Nur Ainiyah, “Identitas Diri dan Makna Guru Profesional sebagai Komunikator Pendidikan (Perspektif Fenomenologis),” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): h. 3

³⁷ Ade Lisna dan Erni Munastiwi, “PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU” 5, no. 1 (2020): h. 11.

teori belajar, strategi-stategi pembelajaran dan yang jelas dapat mengantarkan peserta didik menjadi dirinya sendiri.

Dengan adanya konsep pendidik professional sebagaimana paparan di atas, tidak diragukan lagi bahwa peran seorang pendidik tidaklah hanya sekedar melakukan pembelajaran sebagai formalitas belaka, melainkan seorang pendidik yang professional memiliki progres yang jauh kedepan terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri dan tepatnya dapat membentuk peserta didik menjadi dirinya sendiri atau sering disebut dengan pendidikan yang memanusiakan manusia.

2. Strategi penjaminan mutu pendidikan

Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) digunakan sebagai elaborasi atau perpaduan dari UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. SPMP merupakan proses sistematis dan upaya sadar serta konsisten yang berjalan berkelanjutan dalam menentukan pencapaian standar pengelolaan pendidikan yang diyakini mampu memuaskan para pelajar, orang tua, sumber daya pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan³⁸. Dimana standar pengelolaan pendidikan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005.

Lalu mengapa SPMP menjadi suatu keharusan dalam pengelolaan pendidikan? *Pertama*, SPMP digunakan sebagai acuan dalam memetakan mutu pengelolaan pendidikan baik ditingkat regional dan nasional. *Kedua*, proses dan produk SPMP dapat menjawab serta meyakinkan bahwa pendidikan mampu memberi kepuasan terhadap pemangku kepentingan pendidikan. *Ketiga*, SPMP digunakan untuk menentukan model fasilitasi peningkatan kinerja sekolah

yang meliputi sistem pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan pemberdayaan masyarakat pendidikan dan masyarakat luas dalam pengelolaan pendidikan di sekolah³⁹. Meski demikian, upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan cara dan pendekatan yang mungkin sama atau berbeda hal ini bergantung pada kondisi sosiologis tempat pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan sejatinya tidak dapat berhenti beroperasi meski itu sejenak karena hanya menunggu sistem, sarana, program, sumber daya yang sempurna. Upaya peningkatan mutu harus terus berjalan meski tahap demi tahap. Mengingat bahwa persoalan pendidikan sangatlah kompleks dan tuntutan zaman dengan perkembangan teknologi yang pesat pendidikan mau tidak mau harus siap untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam setiap prosesnya, pengelolaan pendidikan haruslah selalu berpandangan progresif jauh kedepan. Drucker menyampaikan pesan bahwa pentingnya perubahan untuk persiapan masa depan berdasarkan kondisi saat ini, bahkan mutu pun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis⁴⁰. Apa yang dikatakan Drucker mengisyaratkan bahwa mutu dan program untuk mencapai mutu dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga dalam perjalanannya memerlukan upaya persiapan serta rencana yang sistematis.

Mutu bagi suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun manufaktur termasuk lembaga pendidikan, penyediaan produk yang berkualitas sudah menjadi suatu tuntutan dalam persaingan (Banks, 1989). Semakin meningkatnya daya kebutuhan dari konsumen menuntut suatu produk untuk menjaga kualitasnya, oleh karena itu perlu adanya suatu standarisasi ataupun penjaminan mutu. Penjaminan mutu (*quality assurance*)

³⁸ | Made Alit Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali* (Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013), h. 5.

³⁹ Mariana dan et. al, h. 3.

⁴⁰ Mariana dan et. al, h. 8.

adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga kosumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan⁴¹. Atas dasar inilah kemudian dalam pengelolaan pendidikan perlu adanya standar mutu, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri⁴². Mutu sama halnya dengan kualitas, artinya baik perusahaan atau pendidikan tentu antara satu dengan yang lain memiliki mutu atau kualitas yang berbeda-beda. Konsep mutu atau kualitas memiliki cakupan yang luas. Beberapa ahli menyatakan Reeves dan Bednar (1994) mendefinisikan kualitas sebagai nilai, kesesuaian dengan suatu spesifikasi atau persyaratan tertentu, atau juga kecocokan manfaat. Spencer (1994) mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang memuaskan konsumen, sehingga setiap upaya pengembangan kualitas harus dimulai dari pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan konsumen. Prakosa (1999) mendefinisikan kualitas sebagai perbedaan yang dirasakan oleh konsumen atas kualitas yang dijanjikan (promised quality) dengan kenyataan⁴³. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan mutu adalah manfaat, nilai, dan kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu atas input, proses dan output yang dirasakan oleh konsumen. Sehingga definisi mutu pendidikan mencakup didalamnya input, proses juga output.

Berikut beberapa opsi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam penjaminan mutu pendidikan:

a. Total Quality Management (TQM)

Sekolah merupakan lembaga institusi pendidikan yang berfungsi sebagai agen perubahan. Oleh karena itu dalam rangka menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas, dunia pendidikan perlu mengimplementasikan konsep *total quality management* (TQM). TQM dalam sejarahnya digunakan dalam dunia industry dan terbukti telah sukses mengantarkan dunia bisnis dalam menciptakan mutu produksi yang berkualitas bahkan melebihi kepuasan standar para konsumen. Atas dasar itulah kemudian TQM mulai diadopsi didalam dunia pendidikan sebagai system penjaminan mutu, karena TQM dianggap relevan dalam menjawab perkembangan zaman.

Sebelum jauh membahas TQM, perlu untuk diketahui bahwa jantung dari TQM adalah ilmu manajemen. Sebagaimana dijelaskan oleh Erni Munastiwi bahwa manajemen adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin serta mengendalikan sumber daya organisasi dan penggunaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien⁴⁴. Dengan kata lain manajemen dapat pula diartikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya organisasi atau sebuah tata penyelenggaraan yang tidak lain tujuannya adalah agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

⁴¹ Mochamad Nurhuda, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 1, no. 1 (6 Agustus 2018): h. 34

⁴² Zaenal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.), h. 21.

⁴³ "Focused Short Course Data Management Training for Targeted Provincial Quality Assurance

Institutions (LPMPs) staff members" (Sekolah Pasca Sarjana UPI dan AUSAID, 2010), h. 1.

⁴⁴ Muhammad Abdul Latif dkk., "ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU MUTIARA PLUS BANGUNTAPAN," *AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak* 6, no. 2 (30 September 2020): h. 305, <https://doi.org/10.24235/awlad.v6i2.5783>.

Mengutip pernyataan Bukhori⁴⁵ mengemukakan bahwa manajemen sistem pendidikan nasional merupakan suatu proses sosial yang direkayasa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien dengan mengikutsertakan kerjasama serta partisipasi seluruh masyarakat. Agar dapat melahirkan Fungsi, kisi dan kebijakan pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu tentu memerlukan pengelolaan pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan dan berorientasi kepada mutu, yang kemudian dikenal dengan *total quality management* (TQM)⁴⁶. Kemudian Ross (1995) mendefinisikan TQM adalah integrasi semua fungsi dan proses dalam organisasi untuk mencapai peningkatan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan⁴⁷. Berdasar dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa TQM ialah suatu system penjaminan mutu yang dilakukan dengan jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus untuk memuaskan pelanggan.

Pada dasarnya TQM memiliki tiga falsafah dasar, yaitu 1) berfokus pada kepuasan pelanggan/konsumen sehingga terjalin mata rantai hubungan yang dinamis antara pemasok dan pelanggan. 2) pemberdayaan dan pelibatan karyawan/*employee empowerment and involvement*, yang artinya SDM di dalamnya haruslah seorang ahli sehingga perlu diberikan pelatihan yang dapat menggugah kreasi dan semangat progresif. 3) peningkatan kualitas secara berkelanjutan/*continuous improvement*, yang artinya komitmen terhadap peningkatan kualitas harus tertanam dalam bentuk keyakinan pada seluruh SDM yang ada di

dalamnya agar kepuasan terhadap konsumen tetap ada.

Pada dasarnya konsep TQM adalah sistem manajemen yang membuka jalan menuju paradigma berfikir baru yang memberi penekanan pada kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan⁴⁸. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah ketidak puasan pelanggan terhadap mutu pelayanan dan produk, manajamnya persaingan dan anggaran ekonomi. Dalam konteks pendidikan TQM merupakan sebuah metodologi tentang perbaikan secara terus menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis dalam memenuhi kebutuhan, dan harapan pelanggan saat ini dan masa mendatang.

Sekolah bermutu yang telah mengadopsi TQM sebagai metodologi penjaminan mutu setidaknya memiliki lima karakteristik 1) fokus pada kostumer; 2) keterlibatan total; 3) pengukuran; 4) komitmen; 5) perbaikan berkelanjutan⁴⁹. Dan bentuk aktualisasinya dapat dilihat dari a) visi, yakni sejauh mana pandangan pendidikan kedepan; b) Strategi dan Tujuan, yakni tindak lanjut dari visi, seperti halnya program yang akan dibangun dan tujuan sebagai *goals*; c) Tim, yakni keterlibatan SDM untuk seling bekerja sama dan berintegritas; d) Alat, sebagai penjuang berupa sarana dan prasarana dalam menyelesaikan persoalan yang ada; e) *three Cs of TQM* yakni *culture* (budaya) yang didalamnya meliputi aturan-aturan, asumsi atau nilai-nilai implisit yang menyatukan suatu

⁴⁵ Dalam *jurnal Dinamika Ilmu* Vol. 12 No. 2 2012 Kepemimpinan Transformasional Pendidikan Berbasis Total Quality Management

⁴⁶ Miftahul Munir, "Keberadaan Total Quality Management Dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM Dalam Pendidikan)," *Jurnal Realita* 16, no. 1 (2018): h. 3.

⁴⁷ Ahmad Sonhadji K. Hasan, "Penerapan Total Quality Management dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (1999): h. 4.

⁴⁸ Nurul Indana, "Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Mts Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng)," *Jurnal Al-Idaroh* 1, no. 1 (2017): h. 68.

⁴⁹ Indana, h. 70.

organisasi, *commitment* (komitmen), dan *communication* (komunikasi)⁵⁰.

Dengan adanya TQM sebagai penjaminan mutu pendidikan, arah pendidikan akan lebih terorganisir dengan baik dan diharapkan mampu melahirkan out put lulusan yang berkualitas dan berkarakter.

b. International Organization for Standardization (ISO)

Tak jauh berbeda dengan TQM, ISO juga merupakan salah satu instrument metodologis yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu dan sebagai penjaminan mutu. ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi diluar pemerintahan (*non-government organization/NGO*) yang berdiri sejak 1947. Adapun yang menjadi misi ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga membantu pengembangan kerja sama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi⁵¹.

ISO bergerak dalam ranah standarisasi yang berskala Internasional, ada berbagai macam ISO yang digunakan dengan berbagai macam dan aspek seperti 1) ISO-9001; 2) ISO-14001; 3) ISO-22000; 4) ISO/IEC-27001; 5) ISO-TS-16949 dan lain sebagainya. Dimana masing-masing ISO memiliki standarisasi serta fokus yang berbeda-beda meski pada prinsipnya sama. Dari berbagai macam ISO tersebut, ISO 9001 merupakan standar Internasional yang bergerak dibidang manajemen mutu, dan menjadi persyaratan manajemen yang paling populer. Sehingga

ISO-9001 dapat diterapkan dalam berbagai organisasi baik yang berskala besar atau pun kecil, apapun produk dan layanannya, apakah itu perusahaan business, layanan publik, pemerintahan dan pendidikan. Yang jelas adalah dalam pendekatan ISO-9001, selama berorientasi untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, ISO-9001 dapat diterapkan termasuk pendidikan.

Perumusan ISO-9001 berawal dari ISO-9000:1987 yang kemudian mengalami beberapa kali revisi, revisi pertama yang dilakukan pada tahun 1994 menghasilkan ISO 9000:1994 yang memuat standar ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Pada versi ini, ISO 9000 memuat petunjuk penggunaan, sedangkan ISO 9001, 9002, dan 9003 menangani sistem mutu untuk penjaminan mutu terhadap pihak eksternal, sementara ISO 9004 ditujukan untuk kebutuhan internal. Standar ini mengadopsi pendekatan berbasis proses dan delapan prinsip manajemen mutu⁵². Dimana pendekatan berbasis proses mensyaratkan untuk selalu melakukan indentifikasi, penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan secara berkesinambungan (*continual improvement*). Saat ini ISO-9001 menjadi salah satu standar favorit dalam penjaminan mutu, dan setelah beberapa kali mengalami revisi ISO-9001 berubah menjadi ISO-9001:2008.

Tujuan penerapan ISO-9001:2008 dalam lembaga pendidikan ialah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan, membangun kesadaran tentang perlunya pelayanan prima terhadap konsumen, mendidik diri organisasi (lembaga pendidikan) agar taat terhadap sesuatu yang telah disepakati, dan menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan mutu⁵³. Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah mengadopsi ISO-9001

⁵⁰ Luk-Luk Nur Mufidah, "Aktualisasi Tqm Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Tadris* 4, no. 1 (2009): h. 95.

⁵¹ <https://kjm.ugm.ac.id/language/id/akreditasi-sertifikasi/tentang-iso/> di akses 5-11-2020

⁵² Moh Zainal Fanani, "Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah," *Jurnal Realita* 15, no. 2 (2017): 26.

⁵³ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), h. 307.

mendefinisikan “system manajemen mutu sebagai system manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu”⁵⁴. Dengan kata lain system manajemen mutu dianggap sebagai suatu tatanan yang menjamin akan pelayanan proses, tujuan yang telah di rencanakan serta mutu output.

Sehingga dapat dikatakan ISO-9001:2008 merupakan salah satu standarisasi yang berorientasi pada pendekatan proses, dan berpegang pada prinsip-prinsip manajemen sebagai landasan utamanya. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut: 1) organisasi yang berfokus pada pelanggan; 2) kepemimpinan; 3) keterlibatan SDM; 4) pendekatan terhadap proses yang sistematis pada manajemen; 5) pembuatan keputusan berdasar persoalan yang dianalisis 6) pendekatan nyata; 7) hubungan simbiosis mutualisme; 8) peningkatan berkesinambungan. Dengan adanya kedelapan prinsip ini diharapkan pendidikan mampu meningkatkan mutunya sehingga mampu mencetak output yang dapat bersaing dan yang terpenting adalah anak dapat menjadi dirinya sendiri.

Sallis menterjemahkan bahwa lembaga pendidikan yang telah mengadopsi ISO-9001:2008 setidaknya memenuhi persyaratan berikut⁵⁵:

No	Syarat ISO-9001:2008	Terjemahan Bidang Pendidikan
1.	Tanggung jawab manajemen	Komitmen manajemen sekolah terhadap mutu
2.	System mutu	System mutu
3.	Kontrak	Komitmen dengan pelanggan internal dan eksternal (hak pelajar, orang tua, pengguna kepentingan pendidikan)
4.	Kontrol dokumen	Kontrol dokumen
5.	Pengadaan bahan	Kebijakan seleksi dan ujian masuk
6.	Persediaan produk	Layanan pendukung pelajar yang mencakup kesejahteraan, konseling dan tutorial
7.	Identifikasi Produk	Catatan kemajuan belajar
8.	Kontrol proses	Pengembangan, desain dan penyampaian kurikulum, strategi pembelajaran
9.	Inspeksi dan tes	Penilaian dan tes

⁵⁴ Yunita Kumala Dewi, Yovitha Juliejantingsih, dan Nurkolis Nurkolis, “Implementasi Iso 9001:2015 Dalam Penjaminan Mutu Smp Negeri 2 Kabupaten Demak,” *Jurnal Manajemen Pendidikan*

10.	Perlengkapan inspeksi, penilaian dan tes	Konsistensi metode penilaian
11.	Status inspeksi dan tes	Prosedur dan catatan untuk mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan
12.	Kontrol terhadap produk	Metode dan prosedur diagnostic untuk mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan
13.	Tindakan perbaikan	Tindakan perbaikan terhadap kegagalan pelajar, system untuk menghadapi tuntutan
14.	Penanganan pengaman dan penyampaian	Fasilitas lingkungan fisik, fasilitas pembelajaran, ekstrakurikuler dan lainnya
15.	Catatan mutu	Catatan mutu
16.	Audit mutu internal	Prosedur dan pengembangan staf mencakup prosedur untuk menilai kebutuhan pelatihan dan evaluasi

Dan perlu untuk diketahui bahwa, sertifikasi ISO merupakan sebuah pengakuan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Internasional setelah melalui proses audit internal dan eksternal

3. Esensi Konsep Penjaminan Mutu dan Output Yang Ditawarkan

Berbicara mengenai esensi, tentu berbicara mengenai sesuatu yang penting dan dinilai sebagai makna dari sesuatu. Untuk itu, penulis beranggapan bahwa penting kiranya untuk mengetahui esensi penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan serta output yang ditawarkan.

Ditinjau secara bahasa, kata *assurance* berarti jaminan. Dari pengertian ini mengandung makna perlindungan (terhadap pelanggan) dari kemungkinan kerugian. Sedangkan jika ditinjau dari segi tujuan dari suatu jaminan adalah kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan penjaminan mutu (*quality assurance*) berkenaan dengan apa yang kemudian ditawarkan oleh pendidikan terhadap pelanggan atau stakeholders. Ishikawa (1985) menjelaskan *quality assurance* dimaksudkan untuk menjamin mutu, dimana konsumen dapat membeli dan menggunakan dengan penuh kepercayaan dan kepuasan serta masih dapat

(JMP) 9, no. 1 (1 Oktober 2020): h. 7, <https://doi.org/10.26877/jmp.v9i1.6833>.

⁵⁵ Fanani, “Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah,” h. 6.

digunakan dalam jangka panjang⁵⁶. Berdasar definisi tersebut dan mengingat esensi pendidikan menjadi salah satu tonggak pembangunan bangsa, penjaminan mutu menjadi sesuatu yang amat penting untuk diterapkan dalam pendidikan sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan dan cita-cita bangsa dapat tercapai.

Mengutip apa yang disampaikan Tom Vroeijenstijn penjaminan mutu (*quality assurance*) dengan “*continuous attention to reality for improvement and enhancement*” dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu 1) *are we doing the right things?*; 2) *in the right way?*; 3) *achive the right goals?*⁵⁷. Kemudian Hoy, Jardine dan Wood mengatakan mutu pendidikan merupakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dan dalam rangka mengoptimalkan potensi pelanggan (peserta didik) serta memiliki standar akuntabilitas yang telah disepakati oleh para pengguna pendidikan sehingga terjadi sebuah simbiosis mutualisme diantara keduanya⁵⁸. Sehingga tujuan penjaminan mutu dalam berbagai jenjang pendidikan adalah untuk memberikan acuan dan arah program dengan terus melakukan sebuah pengembangan, perencanaan pengelolaan secara terpadu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pengembangan penjaminan mutu ialah proses dan produk system penjaminan mutu mampu mengedukasi masyarakat luas dan meyakinkan semua pihak yang terkait bahwa melalui SPMP, pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara akuntabel, terukur, sistematis, transparan dan menghargai otonomi sekolah dengan acuan pengembangan peradapan⁵⁹. Secara umum

dapat dipahami bahwa dengan adanya SPMP ini setidaknya mampu memberi rasa percaya dari pelanggan terhadap jasa yang diberikan serta output yang menjanjikan.

Sehingga esensi system penjaminan mutu didasarkan pada pemahaman mengenai makna kualitas secara komprehensif. Artinya jaminan kepuasan khususnya bidang jasa seperti pendidikan, layanan pendidikan sudah barang tentu berkaitan dengan mutu layanan pembelajaran yang dalam konteks ini dipegang oleh pendidik dan pada analisis yang terakhir berkaitan dengan hasil pendidikan, dengan kata lain ialah peserta didik yang menjadi dirinya sendiri dan kompeten.

Sallis (2007) menyatakan bahwa konsep mutu atau kualitas yang diturunkan dari wawasan *total quality management* (TQM) harus dipandang sebagai konsep yang relative bukan absolut⁶⁰. Artinya definisi mutu yang relatif memiliki dua aspek yaitu 1) memenuhi spesifikasi dan 2) memenuhi persyaratan yang dituntut pelanggan. Maknanya adalah kualitas menurut produsen (lembaga pendidikan) dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu produser yang konsisten. Kemudian produk tersebut didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah system yang dikenal sebagai system jaminan mutu yang memungkinkan untuk produksi yang konsisten untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu⁶¹. Yang terakhir adalah bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah dibuat maka produk atau jasa dapat dikatakan bermutu. Hal inilah yang kemudian

⁵⁶ Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, h. 11.

⁵⁷ Ari Prayoga dan Azhar Lujjatul W et al., “Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah,” *Jurnal Murobbi* 3, no. 1 (2019): h. 75.

⁵⁸ Prayoga dan Lujjatul W et al., h. 73.

⁵⁹ Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*, h. 5.

⁶⁰ Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, h. 12.

⁶¹ Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*, h. 8.

disebut (*quality in fact*). Quality in fact menjadi dasar atau makna dari sistem penjaminan mutu.

Oleh sebab itu, jelas bahwa esensi dari penjaminan mutu dan output yang ditawarkan dalam dunia pendidikan, tidak lain adalah penjaminan mutu digunakan sebagai proses. Sedangkan output yang ditawarkan merupakan hasil dari proses. Maksud proses disini adalah upaya sistematis yang dilakukan lembaga atau institusi dalam penyelenggaraan suatu pendidikan di sekolah sesuai dengan konsesnus yang telah dibuat dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional sebagai *goalnya*. Sedangkan produk yang dimaksud adalah segala yang dihasilkan dalam pendidikan melalui sekolah dan harapan masyarakat serta bangsa sebagaimana yang tercantum tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang penulis simpulkan menjadi manusia seutuhnya.

PENUTUP

Kesimpulan

System penjaminan mutu semakin nampak perannya. Untuk itulah pengembangan penjaminan mutu dilakukan terus menerus mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Dengan kata lain penjaminan mutu bersifat relative, bukanlah absolut. Adapun hasil analisis yang dilakukan, penulis berasumsi bahwa 1) pengembangan penjaminan mutu dalam suatu organisasi bisa dikatakan sebagai ruh dalam sebuah organisasi lembaga pendidikan, terlebih seorang pendidik yang memiliki peranan penting sebagai penggerak utama. Dengan adanya pemahaman yang luas dan matang serta kesadaran akan profesi pedidik (guru) akan menghasilkan sebuah keprofesionalan yang hakiki. 2) sistem penjaminan mutu dapat dikatakan sebagai suatu instrumen metodologis yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. 3) esensi dari penjaminan mutu ialah mutu itu sendiri, sedangkan yang menjadi tolak ukur adalah pelanggan sebagai focus

utama dari penjaminan mutu, sedangkan output yang ditawarkan ialah produk atau pun jasa yang tentunya sesuai dengan pemangku kepentingan atas produk atau jasa yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ainiyah, Nur. "Identitas Diri dan Makna Guru Profesional sebagai Komunikator Pendidikan (Perspektif Fenomenologis)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 1–20. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.32>.
- [2] Arifin, Zaenal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.
- [3] Darmaji, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan. "Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan." *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 3 (28 Juli 2019): 130–36. <https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>.
- [4] Dewi, Yunita Kumala, Yovitha Juliejantiningsih, dan Nurkolis Nurkolis. "Implementasi Iso 9001:2015 Dalam Penjaminan Mutu Smp Negeri 2 Kabupaten Demak." *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 9, no. 1 (1 Oktober 2020). <https://doi.org/10.26877/jmp.v9i1.6833>.
- [5] Fanani, Moh Zainal. "Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah." *Jurnal Realita* 15, no. 2 (2017): 26.
- [6] "Focused Short Course Data Management Training for Targeted Provincial Quality Assurance Institutions (LPMPs) staff members." Sekolah Pasca Sarjana UPI dan AUSAID, 2010.
- [7] Hadi, Abdul. "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269.

- <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.5260>.
- [8] Haryono, dan Budiyo, dkk. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang." *Jurnal PANJAR* 1, no. 1 (2019).
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/panjar/>.
- [9] H.M Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Pengarahan Agama*. Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1998.
- [10] Indana, Nurul. "Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Mts Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng)." *Jurnal Al-Idaroh* 1, no. 1 (2017): 25.
- [11] Koswara, Koswara, dan Rasto Rasto. "Kompetensi Dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 1, no. 1 (18 Agustus 2016): 61.
<https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3269>.
- [12] Kusnandi. "Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan." *Jurnal IJEMAR* 1, no. 1 (Desember 2017).
- [13] Latif, Muhammad Abdul, Erni Munastiwi, Deska Puspita, dan Adinda Putri Amanah. "ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU MUTIARA PLUS BANGUNTAPAN." *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak* 6, no. 2 (30 September 2020): 301.
<https://doi.org/10.24235/awlad.v6i2.5783>.
- [14] Lisna, Ade, dan Erni Munastiwi. "PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU" 5, no. 1 (2020): 6.
- [15] Maragustam. *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- [16] Mariana, I Made Alit, dan et. al. *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*. Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013.
- [17] Mufidah, Luk-Luk Nur. "Aktualisasi Tqm Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Tadris* 4, no. 1 (2009): 15.
- [18] Mulyani, Fitri. "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 03, no. 01 (2009): 8.
- [19] Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008.
- [20] Munir, Miftahul. "Keberadaan Total Quality Management Dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM Dalam Pendidikan)." *Jurnal Realita* 16, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.
- [21] Mustofa, -. "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 4, no. 1 (29 Februari 2012).
<https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>.
- [22] Nurhuda, Mochamad. "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 1, no. 1 (6 Agustus 2018): 32–60.
<https://doi.org/10.33367/ijies.v1i1.518>.

- [23] “Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,” t.t.
- [24] Permana, Nana Surya. “Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru.” *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 8.
- [25] Prayoga, Ari, dan Azhar Lujjatul W et al. “Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah.” *Jurnal Murobbi* 3, no. 1 (2019): 70–84.
- [26] Putro Widoyoko, Eko. “Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” Dalam *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru*, 9. Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2008.
- [27] Roskina Mas, Sitti. *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: ZAHIR publishing, 2017.
- [28] Rusdiana. *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*. 1. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016.
- [29] Sonhadji K. Hasan, Ahmad. “Penerapan Total Quality Management dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (1999).
- [30] Sridana, Nyoman, Sudirman Wilian, dan Dadi Setiadi. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA).” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 1, no. 1 (22 Desember 2018).
<https://doi.org/10.29303/jpmi.v1i1.212>.
- [31] Suwarno, -. “Peran Guru dalam Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2004.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2 Maret 2012).
<https://doi.org/10.21831/jep.v2i1.656>.
- [32] Taher, Sartika M, dan Erni Munastiwi. “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Di TK Islam Terpadu Salsabila Al-Muthi’in Yogyakarta.” .. *Juni* 4, no. 2 (2019): 16.
- [33] “Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,” t.t.
- [34] Wibowo, Agus. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. 1 ed. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012.
- Wiryokusumo, Iskandar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- [35] <https://www.kompasiana.com/yunitamn/54f99080a3331140548b496d/penyebab-rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia>
- [36] <https://malangtimes.com/baca/46876/20191206/090800/kualitas-pendidikan-indonesia-peringkat-5-asean-warganet-20-tahun-reformasi-masih-kalah-dengan-malaysia-miris-jiwa>
- [37] <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN